

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Rahajeng Neysa Alifia
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Rahajengneysa18@gmail.com

Moh. Khusaini
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Khusaini@ub.ac.id

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:
15 Desember 2023

Tanggal Revisi:
2 Januari 2024

Tanggal Diterima:
16 Januari 2024

Publikasi On line:
28 Maret 2024

Abstract

The achievement of human development is frequently interconnected with the economic growth. Fiscal decentralization allows local governments to enhance budget management in order to stimulate economic growth through expenditure and investment. Despite having the second highest Human Development Index (HDI) in Java, the Special Region of Yogyakarta faces difficulties of being the province with the lowest economic growth in Java. Hence, the government's involvement in allocating funds towards education, healthcare, and investment is crucial in fostering economic growth and promoting human development. This study used path analysis technique to investigate the correlation between government expenditure on education and health services, as well as the investment in human development through economic growth in the District/City of Yogyakarta Special Region. The data used is secondary data collected between 2015-2021, encompassing four districts and one city. The research using the trimming model revealed that government expenditure on the education sector has a noteworthy adverse impact on HDI, albeit indirectly, affecting economic growth. Government expenditure on healthcare has an indirect but significant positive impact on the HDI via promoting economic growth. Conversely, investment does not exert a substantial impact, either directly or indirectly on HDI.

Key Words: Government Spending, Investment, HDI, Economic Growth

Abstrak

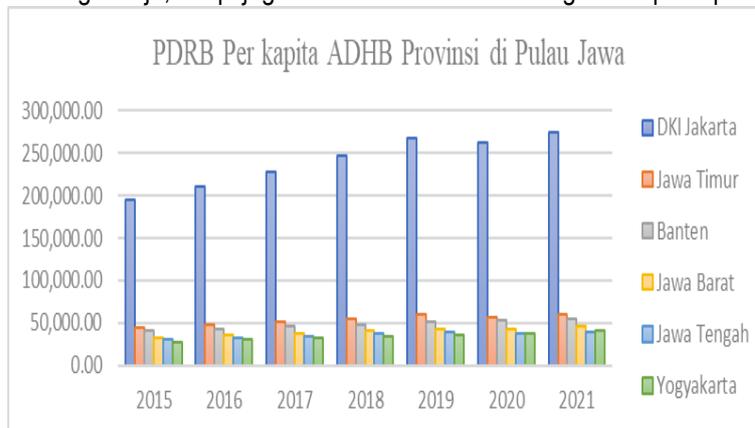
Pencapaian pembangunan manusia sering kali berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan anggaran dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran dan investasi. Meskipun memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi kedua di Pulau Jawa, Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi kesulitan sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Pulau Jawa. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk pendidikan, kesehatan, dan investasi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan manusia. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (path analysis) untuk menyelidiki hubungan antara pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta investasi dalam pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan antara tahun 2015-2021, yang mencakup empat kabupaten dan satu kota. Penelitian yang menggunakan model trimming ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap IPM, meskipun secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan memiliki dampak positif secara tidak langsung namun signifikan terhadap IPM melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, investasi tidak memiliki dampak yang substansial, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap IPM.

Key Words: Pengeluaran Pemerintah, Investasi, IPM, Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

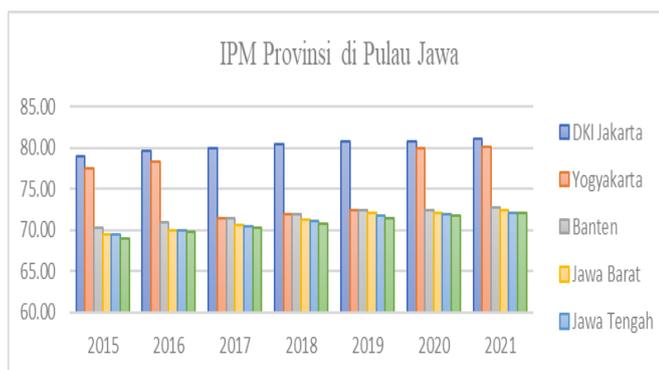
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkhusus di negara berkembang seperti Indonesia merupakan investasi penting bagi kemajuan bangsa. Salah satu aspek penting dari investasi ini adalah pembangunan manusia yang mengacu pada suatu proses yang bertujuan memberikan individu kesempatan yang lebih luas, terutama dalam hal peluang hidup, pengetahuan, dan aspek ekonomi, sehingga mereka dapat mencapai taraf hidup yang layak. Melalui konsep pembangunan manusia, Hermawati et al. (2018) menyatakan jika keberhasilan pembangunan dievaluasi berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan kapasitas masyarakat untuk memperoleh sumber daya dan memenuhi kebutuhan dasar mereka secara memuaskan. Pembangunan manusia berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, Zulham et al. (2017) melakukan penelitian yang menemukan bahwa selain dari sisi anggaran, faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dipandang penting untuk meningkatkan pembangunan manusia.

Harrod-Domar juga menyatakan jika pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui investasi yang menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produksi, dan merangsang pengeluaran agregat. Selain itu, investasi yang terfokus pada bidang pendidikan dan kesehatan bukan hanya menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa dampak positif secara langsung pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya, berinvestasi dalam fasilitas pendidikan dan perawatan kesehatan yang dapat diakses tidak hanya meningkatkan produktivitas melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan pada peningkatan IPM.



Gambar 1. Realisasi PDRB Per kapita ADHB di Enam Provinsi Pulau Jawa Tahun 2015-2021
Sumber: BPS (2024)

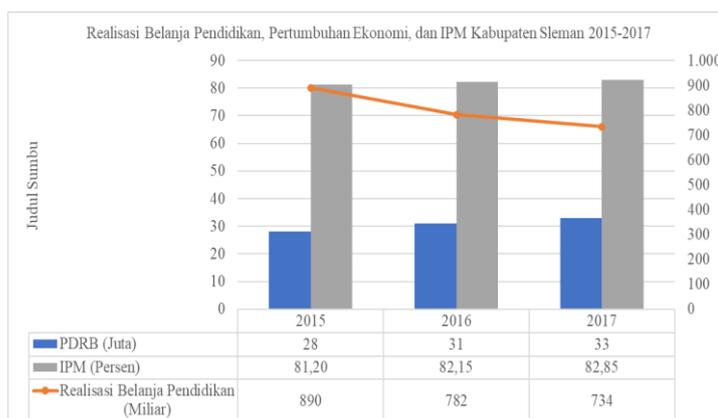
Pulau Jawa terdiri dari enam provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Meskipun Jawa berfungsi sebagai pusat ekonomi Indonesia, terdapat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di seluruh provinsinya. Dari tahun 2015 hingga 2021, DKI Jakarta selalu menduduki posisi teratas sebagai daerah dengan nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Di sisi lain, Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan tren sebaliknya, memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi paling rendah di antara semua provinsi di Pulau Jawa selama periode tersebut. Simarmata & Dinar Iskandar (2022) menyatakan jika pertumbuhan ekonomi setelah diamati memiliki efek yang baik terhadap pembangunan manusia, sehingga mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga akan berkontribusi terhadap pembangunan manusia.



Gambar 2. IPM di enam Provinsi Pulau Jawa Tahun 2015-2021
Sumber: BPS (2024)

Faktanya, meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi terendah di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki posisi kedua dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa, setelah Jakarta dan termasuk kedalam kategori IPM tinggi. Fenomena di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana tingkat pembangunan manusia tinggi namun pertumbuhan ekonomi tidak sebanding menunjukkan terjadinya *looped human development* (Nainggolan et al., 2022). Kondisi tersebut dapat terjadi karena masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kecenderungan hidup hemat yang tercermin dalam kegemaran dalam menabung. Hal ini juga didukung dari data laporan perekonomian yang dirilis oleh Bank Indonesia pada bulan Agustus 2021, yang menunjukkan bahwa nilai dana pihak ketiga meliputi tabungan, deposito, dan giro di Provinsi Yogyakarta mencapai nilai 74,3 T, melebihi nilai kredit.

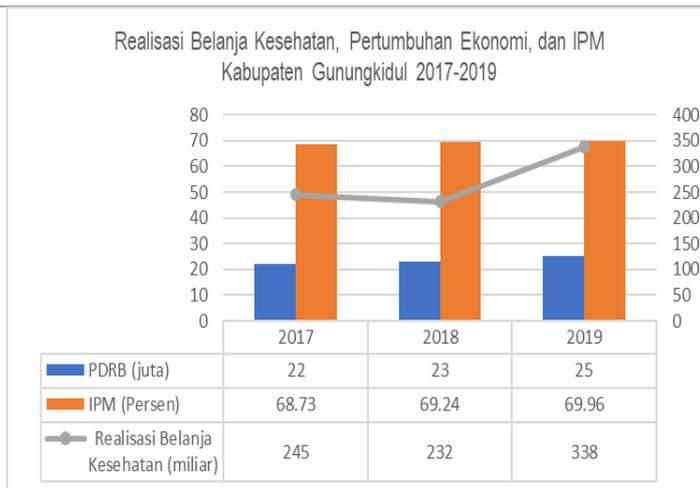
Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemenuhan aspek fasilitas yang lebih baik bagi masyarakat sudah menjadi tugas dari pemerintah khususnya pemerintah daerah. Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu pemerintah daerah, memiliki fleksibilitas untuk mengalokasikan dana sesuai dengan salah satu fungsi dari APBD, yaitu fungsi redistribusi. Oleh karena itu, anggaran akan dialokasikan untuk sektor-sektor yang sangat penting dalam bentuk pengeluaran pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah di bidang tertentu dapat menghasilkan pengganda ekonomi dengan menstimulasi permintaan agregat yang terjadi ketika pemerintah mengalokasikan dana melalui pengeluaran sesuai dengan fungsi tertentu (Arfiyansyah & Khusaini, 2018). Menurut Todaro & Smith (2012) pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi yang membutuhkan keterlibatan pemerintah melalui pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan.



Gambar 3. Realisasi Belanja Pendidikan, PDRB, IPM Kabupaten Sleman 2015-2017

Sumber: BPS Provinsi DIY diolah (2024)

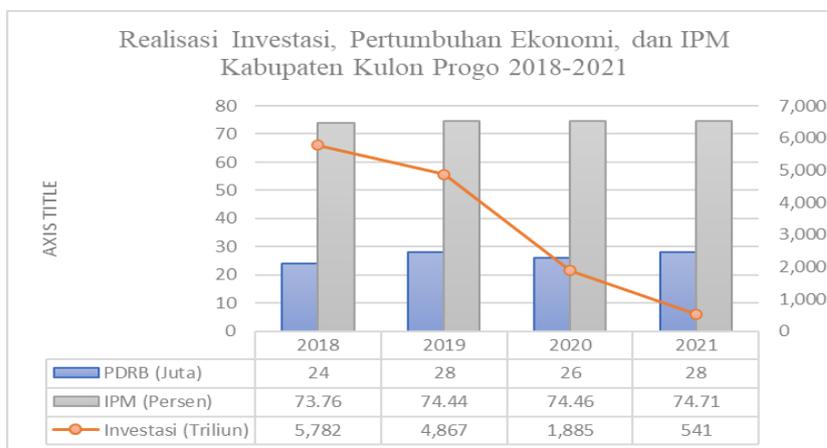
Akan tetapi, sejak tahun 2015 hingga 2017 nilai realisasi belanja Pendidikan di Kabupaten Sleman selalu mengalami penurunan. Sedangkan PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dan IPM di Kabupaten Sleman selama periode tersebut selalu mengalami peningkatan. Fakta ini berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Arfiyansyah & Khusaini, 2018). Menurut temuannya, belanja fungsi pendidikan berpengaruh signifikan terhadap PDRB dan IPM yaitu ketika belanja fungsi pendidikan meningkat maka nilai PDRB dan IPM juga meningkat, sedangkan penurunan belanja fungsi pendidikan dapat menyebabkan penurunan nilai PDRB dan IPM.



Gambar 4. Realisasi Belanja Kesehatan, PDRB, IPM Kabupaten Gunungkidul 2017-2019

Sumber: BPS Provinsi DIY diolah (2024)

Hubungan antara realisasi belanja kesehatan dengan nilai pertumbuhan ekonomi dan IPM di Kabupaten Gunungkidul juga terdapat perbedaan fakta di lapangan berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sasongko et al (2021) dan Pratama & Mandai (2023) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara belanja pemerintah fungsi kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan, dapat dilihat nilai realisasi belanja kesehatan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 awalnya sebesar Rp 245 miliar turun menjadi Rp 232 miliar pada tahun 2018, sedangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan IPM tetap mengalami kenaikan.



Gambar 5. Realisasi Investasi, PDRB, IPM Kabupaten Kulon Progo 2018-2021

Sumber: BPS Provinsi DIY (2024)

Tidak hanya dalam bentuk pengeluaran pemerintah saja, investasi juga berfungsi sebagai aset untuk menaikkan angka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Kabupaten Kulon Progo mencatat tren penurunan realisasi investasi mulai dari tahun 2018 hingga 2021. Meskipun proyek pembangunan bandara internasional baru sedang berlangsung di Kabupaten Kulon Progo, namun tampaknya hal ini tidak mampu sepenuhnya menjaga tingkat investasi yang tinggi. Penurunan nilai investasi rupanya tidak sejalan dengan nilai pertumbuhan ekonomi dan IPM. Pada tahun 2018-2019, nilai investasi turun dari 5.782 triliun menjadi 4.867 triliun sedangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan IPM mengalami peningkatan. Hal ini Kembali terjadi pada tahun 2020-2021, di mana terdapat penurunan nilai investasi, namun pertumbuhan ekonomi dan IPM justru mengalami peningkatan. Fakta ini menarik perhatian, mengingat berdasarkan penelitian Simarmata & Dinar Iskandar (2022) menunjukkan bahwa investasi memberikan pengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan IPM. Serta teori neo-keynes yang digagas oleh Harrod Domar juga menyatakan jika investasi berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Kenaikan dalam investasi dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta IPM, sementara penurunan investasi dapat mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi maupun IPM.

Pengeluaran pemerintah khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan serta investasi modal dalam negeri dan investasi asing yang dilakukan secara optimal akan meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Simarmata & Dinar Iskandar (2022) dengan menggunakan metode *two least square* menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah secara keseluruhan dan investasi memiliki efek positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi yang menggunakan indikator laju PDRB, lalu pengeluaran pemerintah dan investasi juga signifikan positif terhadap IPM. Kemudian dengan menggunakan metode analisis jalur uji sobel, Marchahsufi & Dzulhijiy (2021) menunjukkan hasil jika pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan berdampak signifikan positif terhadap IPM secara langsung tanpa perlu melalui variabel mediasi. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mongan (2019) menunjukkan bahwa pengalokasian dana dari pemerintah untuk sektor kesehatan memiliki dampak negatif signifikan terhadap IPM dan hasil penelitian Muslihatinningsih et al., (2023) menunjukkan jika pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Sedangkan untuk investasi, Asfar et al. (2022) menunjukkan bahwa investasi secara umum memiliki dampak signifikan positif terhadap perekonomian dan pembangunan manusia di Sulawesi Selatan, sedangkan (Maulida et al., 2022) menunjukkan bahwa investasi memberikan dampak yang merugikan pada pertumbuhan ekonomi di Aceh atau pengaruhnya negatif signifikan.

Dari beberapa penelitian terdahulu memberikan temuan yang kontradiktif terkait pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perbedaan hasil dengan menggunakan metode analisis serta indeks pengukuran dari pertumbuhan ekonomi yang berbeda dari penelitian terdahulu. Sehingga peneliti tertarik untuk menginvestigasi lebih lanjut dengan menggunakan variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan serta investasi sebagai fokus utama untuk menguji pengaruhnya terhadap IPM melalui variabel *intervening* pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS dan Hipotesis

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah berkaitan dengan distribusi sumber daya ekonomi yang berada di bawah otoritas langsung pemerintah dan dapat diberikan kepada masyarakat secara tidak langsung melalui pajak (Khusaini, M. 2019). Ada berbagai teori yang menganalisis pengeluaran pemerintah secara khusus, seperti model pembangunan oleh Rostow dan Musgrave yang mana Musgrave percaya bahwa dalam beberapa kasus, investasi swasta sebagai persentase dari produk domestik bruto cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan investasi publik. Sementara itu, Rostow menggambarkan pergeseran aktivitas pemerintah dari penyediaan infrastruktur menuju pengeluaran untuk usaha-usaha komunal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Faisol, Pudjihardjo M, 2020), (Verawati Siringoringo & Purwono, 2021). Selain teori dari Rostow dan Musgrave, Wagner turut mengemukakan pendapatnya terkait pengeluaran pemerintah karena seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita dalam suatu perekonomian, biaya yang dikeluarkan pemerintah juga meningkat karena kebutuhan akan regulasi pemerintah di berbagai bidang hubungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya (Mangkoesubroto dalam Rohima, 2020). Sejalan dengan pendapat tersebut, Peacock & Wiseman melalui teori *displacement effect* menyatakan jika pemerintah diharapkan untuk berusaha meningkatkan pengeluaran publik, sementara masyarakat umum biasanya enggan menanggung pajak yang tinggi yang akan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang terus meningkat (Ayu & Sasana, 2020).

Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan

Di Indonesia, berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) pendidikan memiliki alokasi anggaran yang tinggi yaitu mencapai angka 20% dari APBD. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memajukan sektor pendidikan guna mendukung pembangunan manusia yang pada gilirannya diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan mengacu pada alokasi dana pemerintah untuk mendukung berbagai aspek pendidikan, termasuk pengembangan infrastruktur pendidikan dan penyediaan bantuan keuangan untuk pendidikan (F. Faisol, 2017), (Salsabila & Muhammad Nurjihadi, 2022).

Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, terdapat ketentuan yang mengharuskan alokasi 10% dari keseluruhan anggaran untuk perawatan kesehatan dan tidak termasuk biaya yang terkait dengan gaji dan tunjangan karyawan. Perihal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk

memprioritaskan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dengan mengalokasikan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat karena kesehatan merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki wewenang untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dalam bentuk fasilitas dan infrastruktur kesehatan, yang mengharuskan pemerintah mengalokasikan dana wajib sebagai bentuk tanggung jawab kesehatan (Wijayanto et al., 2015).

Investasi

Menurut Pardiansyah (2017) investasi adalah tindakan khusus untuk menyisihkan sejumlah uang tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial tertentu di kemudian hari. Sukirno Sadono (1997) menyatakan jika investasi mengacu pada akuisisi aset modal, seperti peralatan produksi dengan tujuan meningkatkan kapasitas untuk menghasilkan produk dan layanan dalam perekonomian. Hal ini selaras dengan teori neo-keynes yang digagas oleh Harrod Domar yang menyatakan jika investasi berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Investasi memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas produktif ekonomi yang mengarah pada permintaan masyarakat akan barang dan jasa dan dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Hanım et al., 2022).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan produksi produk dan jasa untuk memajukan kegiatan ekonomi dan menghasilkan peningkatan kemakmuran masyarakat (Mukamad Rofii & Sarda Ardyan, 2017). Menurut Yunianto (2021) pertumbuhan ekonomi mengacu pada transformasi yang sedang berlangsung dari keadaan ekonomi suatu wilayah tertentu, yang mengarah ke situasi yang lebih baik selama jangka waktu tertentu. Salah satu teori pertumbuhan ekonomi yang terkenal yaitu teori Solow. Teori pertumbuhan Solow mengembangkan model Harrod Domar jika pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat tidak hanya pembentukan modal saja tetapi juga ada faktor tenaga kerja, dan teknologi. Melalui persamaan $Y=F(KL)$, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi kapital/modal (K) dan tenaga kerja (L). Modal merupakan faktor yang paling penting karena kegiatan yang dirancang tidak dapat berjalan jika tidak ada modal sehingga setiap wilayah diharuskan memiliki modal terlebih dahulu sebelumnya menjalankan wilayahnya. Paul Romer dan Robert Lucas membuat sebuah artikel tentang teori pertumbuhan endogenous yang mengkritik model pertumbuhan ekonomi Solow dan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya juga disebabkan oleh faktor internal (B. Wijayanto, 2019).

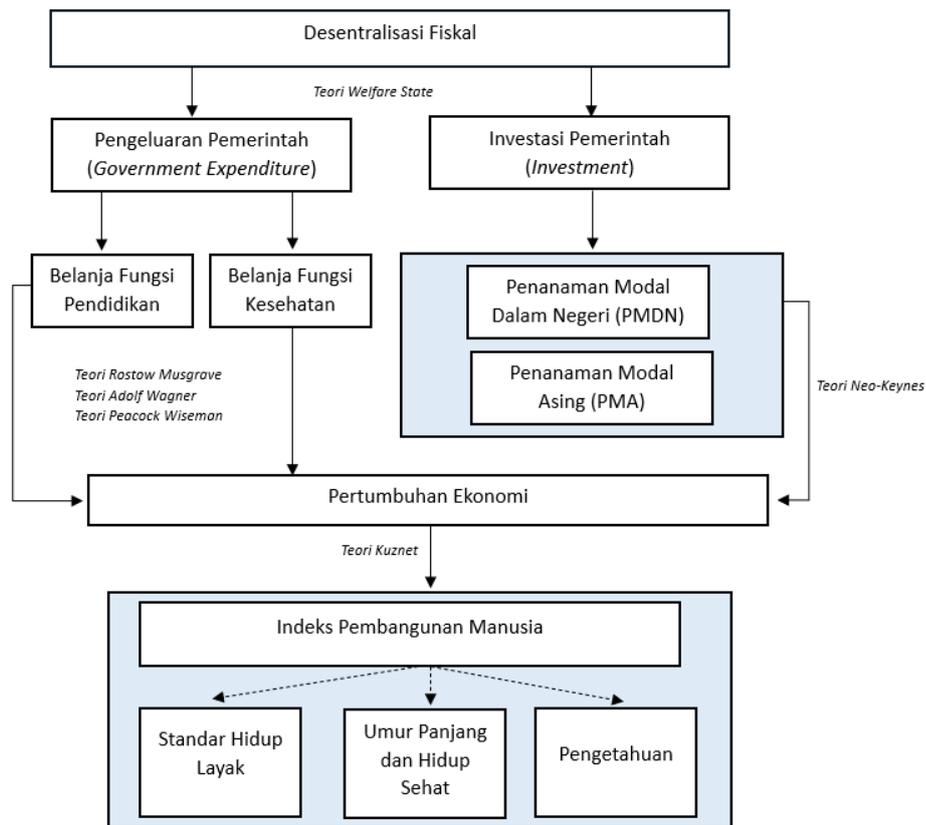
Pembangunan Manusia

IPM menilai aspek kuantitatif dan kualitatif dari karakteristik fisik dan non-fisik penduduk, yang mencakup beberapa aspek kunci seperti kesehatan, pencapaian pendidikan, dan parameter ekonomi (Suliswanto dalam Putri et al., 2020). Teori Pembangunan Modal Manusia oleh Schultz yang diperkenalkan melalui penelitiannya tentang Investment in Human Capital pada tahun 1961, sejalan dengan pentingnya IPM. Teori ini secara pokok menekankan bahwa investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan masyarakat menjadi elemen krusial bagi peningkatan kesejahteraan suatu negara. Dengan mengutamakan investasi dalam modal manusia melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja serta meningkatkan akses kesehatan, sebuah negara diharapkan dapat memperbaiki mutu sumber daya manusia yang dimiliki.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Pembangunan Manusia, dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengalihan wewenang dari pemerintah federal kepada pemerintah lokal dikenal sebagai desentralisasi (Khusaini, 2018). Pemerintah lokal sebagai pelaku pembangunan memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerahnya sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam persamaan identitas $Y=C+I+G+(X-M)$, pendapatan nasional dihasilkan melalui investasi dan pengeluaran pemerintah. Melalui teori Harrod-Domar, investasi memiliki peran penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi (Simarmata & Dinar Iskandar, 2022) Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah yang dilakukan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dalam wilayah provinsi atau kabupaten/kota, baik yang bersifat wajib, pilihan, maupun khusus (Khusaini et al., 2021). Teori welfare state oleh Bentham menegaskan bahwa pemerintah memikul tanggung jawab besar untuk memastikan tingkat kebahagiaan tertinggi bagi masyarakatnya sehingga pemerintah harus menerapkan kebijakan dan inisiatif yang secara konsisten bertujuan untuk meningkatkan kebahagiaan bagi berbagai individu (Elviandri, 2019). Dengan demikian, teori welfare state oleh Bentham memandang bahwa peran aktif pemerintah dalam memastikan kebahagiaan rakyat sangat penting. Menurut hipotesis Kuznet, hal penting dari pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan substansial dalam output per kapita. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB per kapita dan daya beli masyarakat adalah konsisten sehingga pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan meningkatkan daya beli masyarakat. Pertumbuhan daya beli menurut (Simarmata & Dinar Iskandar, 2022) akan berdampak positif terhadap IPM karena daya beli merupakan salah satu komponen yang dikenal sebagai indikator pendapatan.

Hipotesis



Gambar 6. Kerangka Pemikiran Penelitian

Ada beberapa asumsi yang dapat dibuat berdasarkan masalah dan tujuan penelitian:

H1: Diduga bahwa belanja pemerintah fungsi pendidikan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia.

H2: Diduga bahwa belanja pemerintah fungsi kesehatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia.

H3: Diduga bahwa investasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang melibatkan teknik penelitian di mana data diolah dengan menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya (Sugiyono, 2019). Subjek dalam penelitian ini yaitu semua Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan objek penelitiannya belanja pemerintah fungsi pendidikan, belanja pemerintah fungsi kesehatan, investasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks pembangunan manusia dengan rentang waktu 2015-2021. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mengacu pada informasi yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh pengumpul data, melainkan berasal dari dokumen lain (Sugiyono, 2019). Data sekunder yang digunakan berupa data realisasi belanja daerah fungsi pendidikan, kesehatan, realisasi investasi, PDRB per kapita ADHB, dan indeks pembangunan manusia tahun 2015-2021. Penelitian ini memperoleh data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel yang dikombinasikan dengan teknik analisis jalur. Dalam rangka menguji hipotesis, penelitian diuji melalui metode analisis jalur dengan model *trimming* yang dianalisis menggunakan bantuan software Eviews 10. Adapun model sub struktural untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{LogPDRB}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LogP1BP}_{it} + \beta_2 \text{LogP1BK}_{it} + \beta_3 \text{LogP1INV}_{it} + e_{it} \dots \dots (1)$$

$$\text{IPM}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LogP2BP}_{it} + \beta_2 \text{LogP2BK}_{it} + \beta_3 \text{LogP2INV}_{it} + \beta_4 \text{LogP2PDRB}_{it} + e_{it} \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- PDRB = Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Per kapita ADHB)
- BP = Realisasi Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan
- BK = Realisasi Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan
- INV = Investasi
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- P1 = Persamaan Sub Struktural 1
- P2 = Persamaan Sub Struktural 2
- e = Error Term

HASIL PENELITIAN

Analisis jalur digunakan dalam penelitian ini sehingga dibentuk dua persamaan awal yaitu sub struktural 1 menunjukkan pengaruh tidak langsung dan sub struktural 2 menunjukkan pengaruh langsung terhadap variabel dependen. Kedua persamaan tersebut diperbaiki berdasarkan hasil uji signifikansi dan kecocokan model dengan menggunakan model *trimming*. Persamaan yang telah diperbaiki ini disebut sebagai persamaan model *trimming* dalam penelitian ini. Sebelumnya, pada model awal diperlukan serangkaian uji untuk menentukan model regresi data panel terbaik.

Tabel 1.
Uji Pemilihan Model Terbaik

Persamaan	Statistic	Prob.	Model Terpilih
Sub struktural 1			
Uji Chow	112.617417	0.000	FEM
Uji Hausman	1.337393	0.7203	REM
Uji LM Test	80.73975	0.0000	REM
Sub struktural 2			
Uji Chow	130.683033	0.0000	FEM
Uji Hausman	1061.783562	0.0000	FEM

Data Diolah, 2024

Pengujian yang dipergunakan sebagai penentu model regresi data panel apakah merupakan *common effect model* (CEM) atau *fixed effect model* (FEM). Dengan merujuk pada hasil Uji Chow didapat probabilitas kedua persamaan (*p-value*) yaitu 0.000. Dengan membandingkan nilai α (0,05), bisa memberi simpulan bila H_0 tertolak, sedangkan H_1 diterima karena $p < 0.05$. Oleh karena itu, model yang dipilih dari dua persamaan ialah *fixed effect model*. Selanjutnya dilakukan Uji Hausman, terlihat bahwa probabilitas (*p-value*) sub struktural 1 sebesar 0.7203 dan sub struktural 2 memiliki nilai 0.0000. Setelah melihat perbandingan dengan nilai α (0,05) kesimpulannya adalah bahwa untuk Sub struktural 1 H_1 tertolak dan H_0 diterima karena $p < 0.05$, maka Uji Hausman yang dipilih adalah model *random effect model*. Sedangkan untuk sub struktural 2 H_1 diterima maka sub struktural 2 diperoleh model terbaik *fixed effect*, maka sub struktural 2 tidak diperlukan langkah selanjutnya ke LM Test. Karena sub struktural 1 model terbaiknya ialah *random effect model*, maka diperlukan pengujian lanjutan untuk mengetahui apakah model terbaik adalah *common effect* atau *random effect*. Diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.000 sehingga H_1 diterima atau model terpilih yaitu *random effect model*.

Setelah melakukan pemilihan model terbaik maka dilakukan uji asumsi klasik untuk menguji asumsi apakah estimasi yang ada dalam persamaan analisis jalur memiliki sifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Dari seluruh uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas didapatkan jika persamaan awal telah lolos uji asumsi klasik.

Tabel 2.
Uji Parsial Sub Struktural 1 Model Awal

Variabel	Coef.	Std. Error	t-Stats	Prob
BP	-0.171768	0.051802	-3.315869	0.0031
BK	0.547864	0.132320	4.140443	0.0004
INV	0.016328	0.052926	0.308509	0.7606
_cons	8.400546	1.663121	5.051072	0.0000

Data Diolah, 2024

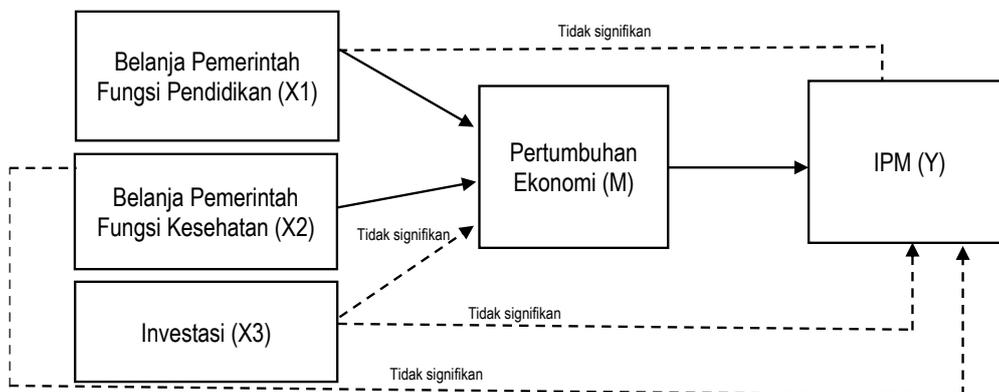
Hasil pengujian hipotesis pada persamaan sub struktural 1 menemukan bahwa variabel investasi (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi variabel belanja pendidikan (X1) dan belanja kesehatan (X2) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan metode *trimming* maka variabel investasi akan dihapuskan dari persamaan sub struktural 1.

Tabel 3.
Uji Parsial Sub Struktural 2 Model Awal

Variabel	Coef.	Std. Error	t-Stats	Prob
BP	0.347875	0.177076	1.964552	0.0628
BK	0.118899	0.493286	0.241034	0.8119
INV	-0.246400	0.159656	-1.543318	0.1377
PDRB	5.51894	0.701200	7.870788	0.0000
_cons	-12.26103	6.609401	-1.855089	0.0777

Data Diolah, 2024

Berbeda halnya dengan persamaan sub struktural 2 yang menemukan bahwa hanya variabel pertumbuhan ekonomi (M) yang berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan belanja pendidikan (X1), belanja kesehatan (X2), dan investasi (X3) tidak berpengaruh secara langsung terhadap IPM. Dengan menggunakan metode *trimming* maka variabel belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan investasi akan dihapuskan dari persamaan sub struktural 2.



Gambar 7. Struktur Model *Trimming*
Ilustrasi Penulis, 2024

Keempat koefisien jalur yang tidak signifikan ini perlu dikeluarkan dari model awal dan dilakukan perbaikan model dengan menggunakan model *trimming* untuk menentukan model persamaan yang baru. Hal ini bertujuan untuk menghindari bias koefisien yang timbul dalam menentukan total pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen ketika pengaruhnya tidak signifikan.

Tabel 4.
Uji Parsial Sub Struktural 1 Model *Trimming*

Variabel	Coef.	Std. Error	t-Stats	Prob
BP	-0.166724	0.045154	-3.692342	0.0012
BK	0.582602	0.092228	6.317001	0.0000
_cons	8.223911	1.494615	5.502362	0.0000

Data Diolah, 2024

Setelah melakukan uji asumsi klasik pada persamaan baru hasil *trimming* didapatkan hasil jika persamaan sub struktural 1 dan sub struktural 2 lolos uji asumsi klasik dan dapat melanjutkan untuk uji hipotesis. Hasil uji hipotesis untuk model *trimming* pada sub struktural 1 didapatkan hasil jika belanja pemerintah fungsi pendidikan (X1) diperoleh nilai t hitung sebesar $3.692342 > t$ tabel yaitu 2.051830516 dan nilai sig. $0.0012 < 0.05$, maka berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (M) di Kabupaten/Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk belanja fungsi kesehatan (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar $6.317001 > t$ tabel yaitu 2.051830516 dan nilai sig. $0.0000 < 0.05$ sehingga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (M).

Tabel 5.
Uji Parsial Sub Struktural 2 Model *Trimming*

Variabel	Coef.	Std. Error	t-Stats	Prob
PDRB	5.108066	0.568028	8.992635	0.0000
_cons	-6.328701	6.204371	-1.020039	0.3179

Data Diolah, 2024

Persamaan sub struktural 2 model *trimming* didapatkan hasil jika pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap IPM di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta karena diperoleh nilai t hitung sebesar 8.992635 > t tabel yaitu 2.048407142 dan nilai sig. 0.0000 < 0.05.

Tabel 6.
Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, Total

Variabel	Koefisien Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh Total
X1	-0.167	-	-0.853	-0.853
X2	0.583	-	2.978	2.978
X3	-	-	-	-
M	5.108	26.092	-	26.092

Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis jalur dengan metode *trimming* maka ditemukan bahwa variabel belanja pemerintah fungsi pendidikan memiliki pengaruh koefisien sebesar -0,167 terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pengaruh tidak langsung terhadap IPM sebesar -0,853 melalui pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah fungsi kesehatan memiliki pengaruh koefisien sebesar 0,583 terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pengaruh tidak langsung terhadap IPM sebesar 2,978 melalui pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, untuk Investasi tidak berpengaruh signifikan secara langsung maupun secara tidak langsung.

PEMBAHASAN

Pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Koefisien pengaruh dari belanja pemerintah pada fungsi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar -0,167, sehingga setiap kenaikan satu miliar rupiah dalam belanja fungsi pendidikan diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 167 ribu rupiah. Belanja fungsi pendidikan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi sebesar -0,853 atau setiap kenaikan satu miliar rupiah dalam belanja fungsi pendidikan akan menurunkan nilai indeks sebesar 0,853. Hasil uji ini konsisten dengan temuan sebelumnya yang dilakukan oleh Pradana (2018) di Provinsi Jawa Timur. Temuan tersebut menunjukkan bahwa belanja fungsi pendidikan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Alasan dari dampak negatif ini dapat dikaitkan dengan sifat pengeluaran pemerintah untuk pendidikan yang tidak berkontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Kemudian berdasarkan studi yang dilakukan oleh Rifa'i & Moddilani (2021), pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap PDB per kapita sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian Muhammad Nor & Nasruddin (2019) menyatakan jika belanja pemerintah fungsi pendidikan menunjukkan signifikan negatif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Selatan.

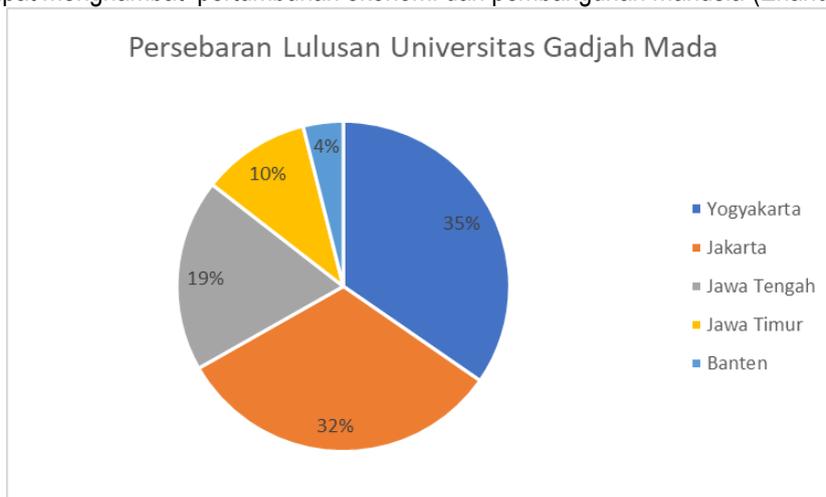
Tabel 7.
Alokasi Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan di Kabupaten/Kota DIY Tahun 2019 dan 2020

Kab/Kota	2019		2020	
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
Yogyakarta	253.940.310.172	160.782.214.201	217.923.963.539	132.566.680.824
Kulonprogo	398.170.116.285	100.200.165.308	351.794.805.723	83.000.591.080

Bantul	321.257.160.574	150.014.990.155	321.257.160.574	121.978.488.136
Gunung Kidul	523.744.321.077	175.605.164.180	523.744.321.077	163.981.487.328
Sleman	523.853.563.928	199.779.246.631	523.853.563.928	199.779.246.631

Sumber: Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi DIY (2024)

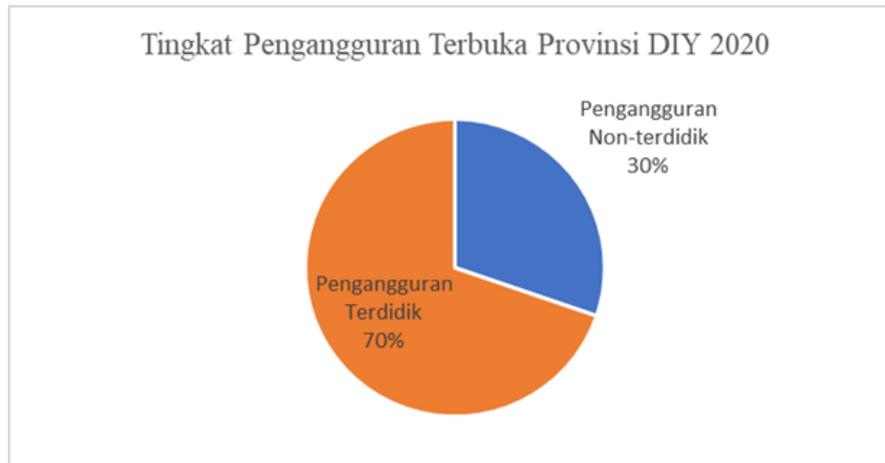
Meskipun terjadi peningkatan yang signifikan dalam alokasi dana pendidikan, namun hasilnya tidak menghasilkan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila dilihat dari Tabel 7 bahwa Kabupaten dan Kota di keseluruhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak tahun 2019 sebelum munculnya pandemi Covid-19 hingga tahun 2020 ketika Covid-19 melanda, tetap menunjukkan kecenderungan alokasi belanja pendidikan tidak langsung yang lebih tinggi. Belanja tidak langsung didefinisikan sebagai mana pengeluaran yang tidak secara langsung terkait dengan aktivitas pendidikan, seperti kompensasi dan tunjangan pegawai. Padahal pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya melalui belanja langsung dengan pengalokasian anggaran untuk pembelian buku dan pembangunan fasilitas penunjang belajar mengajar. Tingginya alokasi anggaran belanja tidak langsung di Kabupaten dan Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin diperparah dengan adanya skandal korupsi yang diungkap oleh Tribun Jogja di salah satu SMK Kabupaten Sleman antara tahun 2016 hingga 2019. Total dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terlibat dalam skandal korupsi tersebut mencapai Rp299.960.000. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pengembangan sekolah, namun disayangkan telah beralih fungsi untuk kepentingan pribadi. Selain itu, terdapat kasus korupsi dalam anggaran belanja langsung yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bantul pada tahun 2020 hingga 2021, dengan nilai korupsi mencapai Rp800.000.000. Berdasarkan penelitian Rachmawati (2022) menyatakan jika korupsi dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi serta menurunkan produktivitas. Didukung teori *Sand the Wheels* yang menjelaskan bahwa penyelewengan dana atau dalam hal ini kasus korupsi bagaikan pasir di roda ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (Erlando, 2019).



Gambar 8. Persebaran Lulusan UGM 2021
 Sumber: Website Alumni UGM (2024)

Di samping itu, meskipun Yogyakarta menjadi destinasi pendidikan yang banyak diminati masyarakat ternyata tidak membuat belanja pendidikan yang dimiliki memberikan dampak positif terhadap pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017 hingga 2022, menunjukkan jika fenomena tersebut dapat terjadi karena sebagian besar masyarakat yang menempuh pendidikan di Yogyakarta masih berorientasi untuk bekerja di luar kota karena terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat upah yang diperoleh di Yogyakarta. Penelitian Synthesa (2021) juga mendukung fakta tersebut jika semakin tinggi tingkat pendidikan, maka keinginan seseorang melakukan migrasi pun semakin meningkat karena peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik akan semakin meningkat pula. Berdasarkan data lulusan Universitas Gajah Mada pada tahun 2015 hingga 2021 sekitar lebih dari 30 ribu lulusannya bekerja di luar daerah Yogyakarta. Hal serupa juga terjadi di salah satu kampus swasta ternama di Yogyakarta yaitu Universitas Islam Indonesia yang pada periode yang sama terdapat lebih dari 10 ribu lulusannya yang memilih bekerja di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Berdasarkan penelitian

Muttaqien *et al.*, (2023) menyatakan jika fenomena migrasi keluar dapat berpengaruh negatif bagi perekonomian daerah yang ditinggalkan karena daerah tersebut akan kekurangan tenaga kerja lokal untuk mengembangkan sektor-sektor penting di daerah.



Gambar 9. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DIY 2020
Sumber: BPS Provinsi DIY (2024)

Tidak hanya persoalan alokasi belanjanya, hasil realisasi belanja pemerintah fungsi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi yang berlawanan juga dipicu oleh ketidakseimbangannya antara peningkatan alokasi dana pendidikan dengan output lulusannya. Akibatnya, muncul fenomena pengangguran terdidik di Provinsi Yogyakarta. Pengangguran terdidik sangat berkaitan dengan masalah pendidikan seperti mutu dan fasilitas pendidikan (Rahmania *et al.*, 2018). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa provinsi yang dijuluki sebagai kota pendidikan ini memiliki tingkat pengangguran yang didominasi oleh orang terdidik. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terdidik mencapai 8.47% dan semakin diperparah dengan adanya pandemik Covid-19 yang melanda pada tahun 2020 sehingga berdampak pada peningkatan pengangguran terdidik yang mencapai angka 12.22%. Menurut teori Simon Kuznet, pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, fenomena pengangguran tenaga terdidik dapat menyebabkan penurunan pendapatan per kapita serta daya beli masyarakat dan berakibat pada menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Berdasarkan hipotesis kedua yang membahas tentang bagaimana pengaruh belanja pemerintah fungsi kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui hasil regresi data panel dengan model *trimming* diperoleh jika realisasi belanja pemerintah fungsi kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia secara tidak langsung dengan melalui variabel mediasi pertumbuhan ekonomi. Setelah melalui analisis regresi data panel dengan menerapkan metode analisis jalur, belanja pemerintah pada fungsi kesehatan terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 0,583. Sehingga, setiap kenaikan satu miliar rupiah belanja pemerintah fungsi kesehatan akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,583 juta rupiah atau 583 ribu rupiah. Pengaruh tidak langsung yang dimiliki oleh belanja pemerintah fungsi kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 2,978 atau setiap kenaikan 1 miliar belanja fungsi kesehatan akan memengaruhi peningkatan indeks sebesar 2,978. Hasil uji ini sesuai dengan teori yang digagas oleh Rostow Musgrave, Adolf Wagner, dan Peacock Wiseman yang mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian (P. M. D. B. S. H. A. Faisol, 2018), Safira *et al.* (2019) bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2004 -2016 karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah meningkatkan pelayanan puskesmas di kabupaten/kota menjadi 24 jam serta mengadakan kegiatan dokter terbang ke daerah terpencil. Lalu juga ada penelitian oleh Zhang *et al.* (2020) yang membuktikan jika pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara China.

Kesehatan adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia sehingga adanya kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan akan berimplikasi pada bertambahnya produktivitas masyarakat. Penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chotimah (2017) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah fungsi pendidikan berdampak positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Pengaruh positif signifikan antara belanja pemerintah fungsi kesehatan dan pembangunan manusia ini disebabkan karena nilai dari realisasi belanja yang cenderung mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Walaupun memiliki pengaruh terhadap pembangunan manusia, tetapi realisasi dari belanja pemerintah fungsi kesehatan tidak berpengaruh secara langsung melainkan harus melalui variabel mediasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena alokasi belanja dalam sektor kesehatan cenderung memerlukan waktu untuk menghasilkan dampak langsung pada pembangunan manusia.

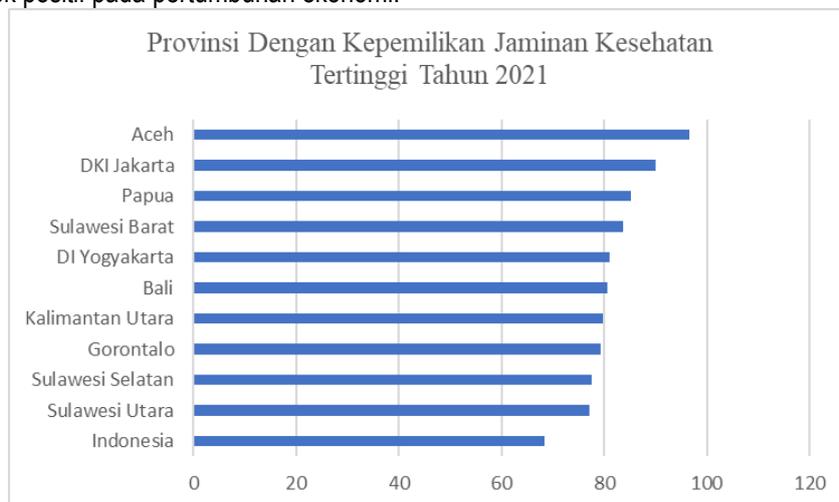
Tabel 8.

Alokasi Realisasi Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan Provinsi DIY Tahun 2021

Alokasi	Realisasi
Belanja Daerah	235.528.032.420
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	118.758.613.526
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	112.973.826.995
Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	3.210.658.140
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan	3.228.500
Program Pelayanan Kesehatan Tradisional	682.517.184

Sumber: Dinas Kesehatan Yogyakarta (2024)

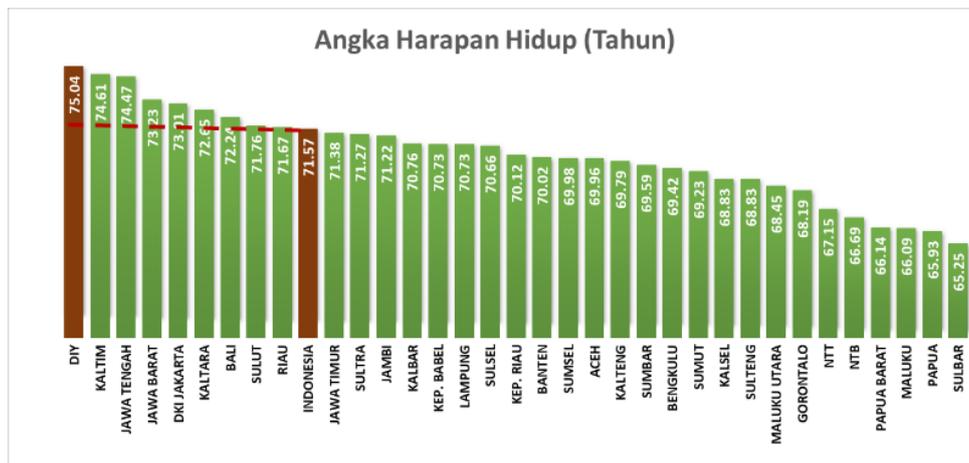
Faktanya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki alokasi belanja pemerintah fungsi kesehatan paling besar pada program-program untuk mendukung otoritas provinsi dan program-program untuk mendukung upaya kesehatan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat. Tingginya angka alokasi jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan menurunkan pengeluaran masyarakat untuk urusan kesehatan serta memberikan ruang untuk realokasi dana untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Akibatnya daya beli masyarakat akan meningkat dan menciptakan efek positif pada pertumbuhan ekonomi.



Gambar 10. Provinsi Dengan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Tertinggi Tahun 2021

Sumber: BPS Pusat (2024)

Tidaklah mengherankan bahwa alokasi dana yang tinggi untuk program pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat telah membuat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masuk ke dalam lima provinsi dengan tingkat kepemilikan jaminan kesehatan tertinggi di Indonesia. Tingginya kepemilikan jaminan kesehatan yang dimiliki mencapai angka 80,98 persen mengindikasikan bahwa masyarakat Yogyakarta memiliki akses yang terjamin terhadap layanan kesehatan. Hal ini memastikan bahwa setiap tahun, biaya kesehatan yang semakin meningkat tidak akan menjadi kendala bagi masyarakat Yogyakarta untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.



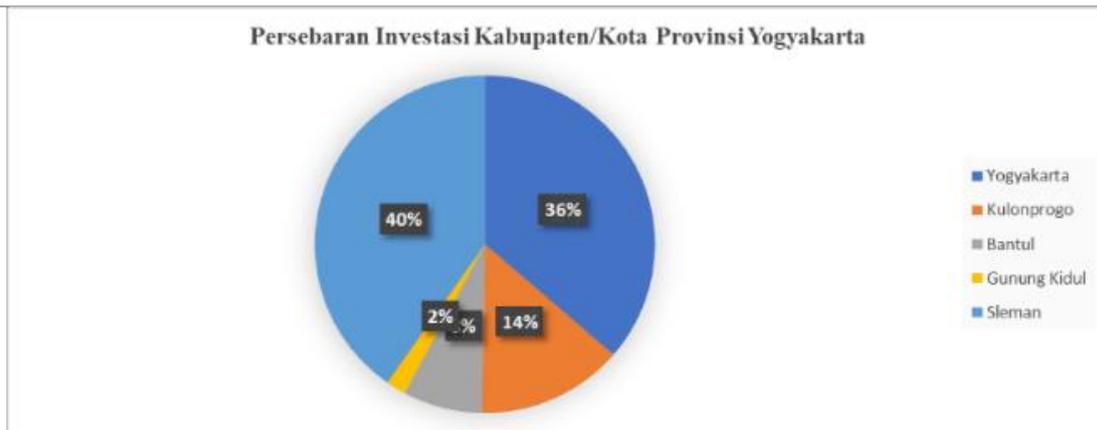
Gambar 11. Angka Harapan Hidup 34 Provinsi Tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi DIY (2024)

Tingginya alokasi dana yang diarahkan untuk pemenuhan upaya kesehatan masyarakat di Provinsi Yogyakarta berdampak positif pada indikator dimensi kesehatan dalam indeks pembangunan manusia. Angka harapan hidup di Provinsi Yogyakarta mencapai nilai tertinggi se-Indonesia, yakni sebesar 75,04 persen. Tindakan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui program pengelolaan jaminan kesehatan yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi risiko terkena penyakit.

Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Berdasarkan hipotesis ketiga yang membahas tentang bagaimana pengaruh belanja investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui hasil regresi data panel dengan model *trimming* diperoleh jika investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia secara langsung maupun secara tidak langsung dengan melalui variabel mediasi pertumbuhan ekonomi. Temuan ini sesuai dengan teori *endogenous growth* yang menegaskan bahwa investasi dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap pembangunan. Investasi jangka panjang biasanya direncanakan untuk periode sepuluh hingga dua puluh tahun, namun dalam penelitian ini, hanya data tujuh tahun yang digunakan sehingga dampaknya terhadap pembangunan masih belum terlihat jelas. Temuan ini juga selaras dengan penelitian Maulida *et al.* (2022) dan Mas *et al.* (2021) yang mengindikasikan jika investasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu penelitian Amar & Arkum (2023) juga menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Bangka karena investasinya memiliki nilai yang kecil dan sifatnya masih bersifat padat modal..



Gambar 12. Persebaran Investasi Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2015-2021
 Sumber: DPMPSTP Kabupaten/Kota Provinsi DIY (2024)

Fokus investasi yang terpusat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam efek investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menjadi pusat aktivitas ekonomi, namun kecenderungan ini mengakibatkan kurangnya distribusi manfaat investasi ke daerah lain dan memperkuat ketimpangan antar wilayah. Selain itu, adanya kerumitan regulasi investasi seperti yang disebutkan oleh Cholid Mahmud, Anggota DPD RI, melalui Harian Jogja juga menyulitkan proses investasi daerah. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki bentuk pemerintahan berbeda dengan daerah lain yaitu dengan menggabungkan sistem desentralisasi dan monarki sehingga gubernur harus dijabat oleh sultan Kraton Yogyakarta dan wakil gubernur adalah adipati Pura Pakualam. Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan jika Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dinyatakan sebagai badan hukum dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan sehingga muncul hak milik atas tanah kasultanan yang dikenal sebagai *Sultan Ground* dan tanah kadipaten yang disebut *Pakualamant Ground* yang terdapat di seluruh kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya peraturan ini membuat proses perizinan investasi di Yogyakarta menjadi lebih rumit dan memakan waktu karena ada beberapa lahan yang memiliki aturan dan mekanisme perizinan sendiri.

Tabel 9.

No.	Kasus Korupsi	Tahun Kejadian
1.	Korupsi Penanaman Modal Dalam Negeri Bidang Perhotelan	2018-2019
2.	Korupsi Dana IMB Apartemen Royal Kedhaton	2017-2021
3.	Penipuan Investasi Proyek Pembangunan Perumahan di Caturtunggal, Sleman	2020
4.	Korupsi Pengadaan Lahan Perumahan Pegawai Bandara Yogyakarta International Airport	2016

Sumber: Tribun Yogyakarta (2024)

Kejadian penipuan di Yogyakarta juga menyebabkan anggaran investasi yang telah dialokasikan untuk membangun suatu proyek menjadi tidak memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia karena dana investasinya tidak digunakan secara benar untuk kegiatan pembangunan. Ada beberapa kasus yang terjadi di Provinsi Yogyakarta, contohnya pada periode tahun 2018 hingga 2019 terdapat kasus penipuan investasi di bidang perhotelan yang merugikan total sebesar Rp 26 miliar. Kejahatan ini dilakukan oleh direktur utama PT Garuda Mitra Sejati, yang mengelola pembangunan hotel dan mal ternama seperti Jogja City Mall, Sleman City Hall, dan Hotel Rich. Selain itu, terdapat juga kasus korupsi terkait izin mendirikan bangunan apartemen di kawasan Malioboro yaitu Apartemen Royal Kedhaton yang dilakukan oleh mantan Wali Kota Yogyakarta dan Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah berlangsung sejak awal tahun 2017. Kasus ini sangat disayangkan karena dari data realisasi investasi di seluruh Provinsi Yogyakarta, Kota Jogja menempati peringkat kedua dengan nilai investasi tertinggi setelah Kabupaten Sleman.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui serangkaian pengujian, dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah pada fungsi pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, namun secara tidak langsung melalui variabel pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja pemerintah pada fungsi pendidikan dapat berpengaruh pada penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Yogyakarta. Sebaliknya, belanja pemerintah pada fungsi kesehatan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia secara tidak langsung. Hal ini terjadi karena pengaruhnya harus melalui variabel pertumbuhan ekonomi, sehingga ketika belanja pemerintah fungsi kesehatan meningkat maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Yogyakarta juga mengalami peningkatan. Terakhir, variabel investasi tidak menunjukkan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap indeks Pembangunan manusia melalui variabel pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang masih kurang efektifnya realisasi investasi baik dari dalam negeri maupun asing terhadap perekonomian dan pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta. Dari hasil penelitian, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya yaitu pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta disarankan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta disarankan untuk mengalokasikan dananya kepada belanja langsung agar supaya dana dapat bermanfaat langsung terhadap kegiatan pendidikan. Lalu alokasi anggaran juga dapat dialokasikan untuk kegiatan pelatihan pengembangan bisnis, sehingga lulusan dari institusi pendidikan di Yogyakarta dapat membuka lapangan kerja baru serta melanjutkan karier di Yogyakarta. Selain itu, disarankan untuk mempertahankan alokasi yang besar pada program pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat. Peningkatan alokasi dapat dialokasikan pada pengembangan fasilitas kesehatan dan peningkatan kompetensi serta kualifikasi sumber daya manusia agar kualitas tenaga kesehatan beserta infrastruktur pendukungnya juga semakin meningkat. Pemerintah daerah juga diharapkan untuk memperjelas regulasi investasi di seluruh wilayah kabupaten dan kota serta menjaga pengawasan terhadap alokasi dana investasi agar dipergunakan dengan benar sesuai dengan tujuan yang telah disepakati secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, H., & Arkum, D. (2023). Pengaruh Investasi terhadap Perekonomian, Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Kemiskinan di Kabupaten Bangka. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 11(1). <https://doi.org/10.31289/publika.v11i1.9103>
- Arfiyansyah, S., & Khusaini, M. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 270–283. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i4.77>
- Asfar, M., Nursini, & Tajibu, M. (2022). Analisis Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja Pengeluaran Pemerintah Dan Ipm Terhadap Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan. *SEIKO: Journal Of Management & Business*, 5(2), 86–97.
- Ayu, D. A., & Sasana, H. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Korupsi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara APEC. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(3), 167–178. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2015-2021. Diakses pada 17 September 2023 melalui <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita ADHB 2015-2021. Diakses pada 17 September 2023 melalui <https://www.bps.go.id/indicator/52/288/1/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-per-kapita.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. (2022). Statistik Keuangan Daerah DIY 2015- 2021. Yogyakarta:BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. (2022). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2015-2021. Yogyakarta:BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. (2022). PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Pengeluaran 2015-2021. Yogyakarta:BPS.
- Chotimah, K. (2017). 4084-7960-1-SM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*, 5(2).

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021). Realisasi Investasi PMA dan PMDN Yogyakarta 2015-2021. Diakses pada 18 September 2023 melalui <https://jogjainvest.jogjaprovo.go.id/web/>.
- Elviandri, E. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 252. <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>.
- Erlando, A. (2019). Studi Ekonomi Korupsi di Beberapa Kota Indonesia. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(2), 130. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i2.10989>.
- Faisol, Pudjihardjo M, S. D. B. H. A. (2020). Does The Effectiveness of The Government Expenditure Accelerate Economic Growth ? *Advances in Economics, Business and Management Research, Volume 144, 144*(Afbe 2019), 7–14. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200606.002>
- Faisol, F. (2017). The Analysis of Local Government Expenditure Efficiency And Its Impact On Economic Growth In Indonesia. *The 3rd International Conference on Economics, Business and Accounting Studies ICEBAST 2017 Faculty of Economics and Business University of Jember Indonesia, November, 24–25*.
- Faisol, P. M. D. B. S. H. A. (2018). The Impact of Public Expenditure and Efficiency for Economic Growth in Indonesia. *Journal of Applied Economics Sciences, XIII*(7), 1992–2003. <http://cesmaa.org/Extras/JAESArchive>
- Hanim, A., Brata Hermawan, G., Niken Wilantari, R., Ekonomi dan Bisnis, F., Jember Jalan Kalimantan, U., & Bumi Tegal Boto, K. (2022). Pengaruh Investasi dan Perkembangan Teknologi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia The Effect Of Investment And Technology Development On Indonesia's Economic Growth. In *Jurnal Penelitian Sains dan Teknologi Indonesia* (Vol. 1).
- Hermawati, T., Siswati, E., & Diah, D. (2018). *Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro*. Vol. 18, Issue (2).
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. UB Press.
- Khusaini, M. (2019). *Ekonomi Publik*. UB Press.
- Khusaini, M., Ashar, K., & Maski, G. (2021). *Manajemen Belanja Daerah*. UB Press.
- Marchahsufi, & Dzulhijiy, I. (2021). *ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP INDEKS*.
- Mas, R., Wijaya, A., Gani, I., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, F. (2021). Pengaruh investasi dan belanja langsung serta belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. *Jurnal FEB UNMUL*, 17(2), 311–319. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Maulida, Y., Hamid, A., & Hasibuan, F. U. (2022). Pengaruh Investasi, Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *JIM (Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 4*(1). <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jim>
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>.
- Muhammad Nor, & Nasruddin. (2019). Analisa Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(1), 33–45.
- Mukamad Rofii, A., & Sarda Ardyan, P. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. In *JEB 17 Jurnal Ekonomi & Bisnis* (Vol. 2, Issue 1).
- Muslihatinningsih, F., Alvidiar, C., & Niken Wilantari, R. (2023). Does government spending affect Human Development Index in East Java Province. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 8(1), 138–149. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i1.19806>.
- Muttaqien, A., Widyaningrum, D., & Putranto, A. (2023). Analisis Migrasi Tenaga Kerja Pada Sektor Perekonomian di Kabupaten Tulungagung. *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(4), 356–367. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i4.2321>.
- Nainggolan, L. E., Nainggolan, N. T., & Lie, D. (2022). Determinan Human Development Index di Indonesia Dengan Model Simultan. *Jurnal Usahid Solo*, 2, 196–211. <https://jurnal.usahidsolo.ac.id/>
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Pradana, S. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).

- Pratama, C., & Mandai, S. (2023). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 241–248. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15352>
- Putri, F., Mahasiswa, U., Ilmu, M., & Usu, E. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. 4(2).
- Rachmawati, A. F. (2022). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.
- Rahmania, M., Wulandari, E., & Sari, W. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik di Kota Padang. *ELEKTIK: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(2), 114–126.
- Rifa'i, A., & Moddilani, G. (2021). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan Terhadap PDB Per Kapita: Spending More Or Spending Better. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 211–226.
- Rohima, S. (2020). *Ekonomi Publik*. Unsri Press.
- Safira, Djohan, S., & Nurjanana. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang infrastruktur pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi kalimantan timur. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 21(2), 211–216. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>
- Salsabila, & Muhammad Nurjihadi. (2022). Analisis Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 12–18. <https://doi.org/10.37673/jebi.v7i1.1991>
- Sasongko, H., Ilmiyono, A. F., & Aldillah, Z. H. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019. *JURNAL AKUNIDA*, 7(1), 12–29. <https://doi.org/10.30997/jakd.v7i1.4651>
- Simarmata, Y. W., & Dinar Iskandar, D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Jumlah Penduduk, Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan IPM: Analisa Two Stage Least Square Untuk Kasus Indonesia. In *JDEP* (Vol. 5, Issue 1). https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
- Sukirno Sadono. (1997). *Makro Ekonomi*. PT. Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*. Alfabeta.
- Synthesa, P. (2021). Pendidikan dan Migrasi di Jawa Barat. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan*, 5(1), 37–46. <https://doi.org/10.26740/jpeka.v5n1.p37-46>.
- Todaro, M., & Smith, S. (2012). *Economic Development*. Pearson.
- Verawati Siringoringo, M., & Purwono, R. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(1), 1539–1547.
- Wijayanto, A., Khusaini, M., Syafitri, W., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Brawijaya, U. (2015). Analisis Pengaruh Pengeluaran Kesehatan dan Pendidikan Serta PDRB Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Terhadap Kabupaten/Kota di Jawa Timur) The Analysis Of Health And Educational Expenditure As Well As Pdrb Per Capita's Influence On Human Development Index (Study of Cities/Regencies at East Java Province). In *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)* (Vol. 1, Issue 2).
- Wijayanto, B. (2019). *Teori Pertumbuhan Endogenous*. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3317961>
- Yunianto, D. (2021). Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. *FORUM EKONOMI*, 23(4), 687–698. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>
- Zhang, X., Gang, Z., & Dong, X. (2020). Effects of Government Healthcare Expenditure on Economic Growth Based on Spatial Durbin Model: Evidence from China. In *Iran J Public Health* (Vol. 49, Issue 2). <http://ijph.tums.ac.ir>
- Zulham, T., Seftarita, C., Ilmu Ekonomi, J., Unsyiah, F., & Aceh, B. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh. 3(1). www.bps.go.id